

Dinilai Sistem Kehumasan Baik, Makassar Ditunjuk Jadi Tuan Rumah IGA 2023

Ryawan Saiyed - MAKASSAR.JURNALNASIONAL.CO.ID

Jan 30, 2023 - 14:35



MAKASSAR - Indonesia GPR Award (IGA) 2023 akan diselenggarakan pada bulan Mei mendatang. Kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah

penyelenggara.

Hal itu diungkapkan langsung saat tim Humas Indonesia, Dwieky datang berkunjung ke Walikota Makassar, Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto, di kediamannya, Kamis (19/1/2023).

Indonesia GPR Awards IGA (2023) merupakan ajang kompetisi apresiasi dan berbagai pengalaman bagi praktisi kehumasan pemerintah di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, anak usaha BUMD tentang praktik kehumasan.

CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan mengatakan Kota Makassar ditunjuk karena dinilai sangat konsen dan peduli terhadap sistem kerja media dan kehumasan.

"Sejauh ini kami melihat Pak Wali sangat menjalankan fungsi humas pada jalur yang positif. Dibandingkan dengan kepala daerah lain, masih banyak yang mengesampingkan kehumasan," ucapnya.

Padahal kehumasan pada suatu instansi sangat berperan penting bagi kesuksesan instansi tersebut.

Sementara, Walikota Makassar, Danny Pomanto sapaanya menyatakan kesiapan Kota Makassar sebagai tuan rumah dalam kegiatan nasional kompetensi kehumasan The 1st IGA 2023.

"Kami siap. Terimakasih karena telah memilih Makassar. Kegiatan-kegiatan nasional seperti ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kota kami," sebutnya.

Untuk kehumasan sendiri, Danny membentuk tim PPID pada setiap OPDnya. Ia menghimbau agar setiap hari ada lima berita kegiatan, dalam seminggu itu ada satu berita nasional dan dalam sebulan ada satu berita viral.

Cara tersebut salah satu bentuk bagaimana peran kehumasan dan pemberitaan dalam menyampaikan informasi utamanya pada program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

"Humas dan media memiliki peran strategis dalam diseminasi informasi. Menyampaikan ke publik program dan kinerja pemerintah agar masyarakat paham apa saja yang telah dijalankan selama ini," ungkapnya.

Ia juga mengatakan tulisan yang termuat dalam berita yang terbit itu dapat menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

"Ini fungsi pemberitaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menilai kinerja pemerintahan baik dari sisi kualitas pelayanan maupun kuantitas lewat berita yang disajikan di berbagai media, dari sini dapat diukur apakah fungsi pemerintahan telah berjalan sesuai relnya," pungkas Danny. (***)